

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi Dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) dalam Jusuf Habel (2016) akuntansi adalah: “... *an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users*”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah: “...sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) dalam Jusuf Habel (2016) akuntansi adalah: “...*an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers*”.

Menurut Mulyadi (2010:3) pengertian akuntansi adalah: “...organisasi formulir, mencatat, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*) Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*) Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*) Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*) Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*) Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*NonProfit Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*) Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*).

2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Rahman Pura (2013:5), akuntansi pajak adalah: “... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:7-8), akuntansi pajak adalah:

“... akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib

pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35), akuntansi pajak adalah:

“... dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Harahap dalam Setianingsih (2014:15), laba akuntansi atau laba komersial adalah perbedaan antara *revenue* yang timbul dari transaksi pada periode tertentu yang dihadapkan pada biaya-biaya periode tersebut. Berdasarkan PSAK 46 (2015), laba fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah perbedaan laba yang disebabkan oleh perbedaan antara standar Undang-Undang perpajakan dan standar akuntansi (Padri Achyarsyah, 2018).

2.1.1.4 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105), laporan keuangan secara umum adalah: "... laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu".

Menurut Fahmi (2015:2), laporan keuangan adalah: "... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Menurut Kasmir (2013:7), laporan keuangan adalah: "...laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Berdasarkan beberapa uraian definisi laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.5 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2015:24), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: "... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter".

Menurut Kasmir (2013:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. "Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya”.

2.1.1.6 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan menurut IAI dalam SAK-ETAP (2011:6)

adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
Laporan ini menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas (modal) pada suatu entitas di periode waktu tertentu, baik pada akhir bulan maupun akhir tahun. Terdapat 2 bentuk laporan posisi keuangan, yaitu bentuk laporan dan bentuk akun.
2. Laporan Laba Rugi
Kinerja keuangan suatu entitas pada suatu periode yang terdiri dari penghasilan dan biaya disajikan pada laporan laba rugi. Laporan ini berisi suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode dimana beban tersebut terjadi.
3. Laporan Arus Kas
Informasi perubahan historis atas kas dan setara kas suatu entitas yang menunjukkan perubahan yang terjadi selama satu periode secara terpisah dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi tersaji dalam laporan arus kas.
 - 1) Arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar merupakan bagian dari arus kas aktivitas operasi
 - 2) Arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar, merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas investasi
 - 3) Arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas, merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu tersaji dalam laporan ini.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi informasi yang memuat tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan serta informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan

2.1.1.7 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:12)

adalah sebagai berikut:

1. Aktiva
Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Oxtaviana dan Khusbandiyah (2016) dalam Angga Hapsila (2018) aktiva dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material.

2) Aktiva Lancar

Aktiva Lancar merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan (diuangkan) tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Aktiva lancar terdiri dari

- Kas (*cash*), semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di Bank yang bisa di ambil setiap saat.
- Surat Berharga, pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara, yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali.

- Piutang Dagang, tagihan dari perusahaan kepada pihak lain (*debitur*) yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit.
- Piutang Wesel, adalah surat perintah penagihan pada seseorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, pada orang yang namanya sudah disebut di dalam surat.
- Piutang pendapatan, pendapatan yang sudah menjadi hak, namun belum diterima pembayarannya.
- Beban Dibayar di Muka, pembayaran beban yang dibayar di awal, namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan.
- Perlengkapan, seluruh perlengkapan yang dipakai demi suatu kelancaran bisnis dan bersifat habis pakai.
- Persediaan Barang Dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapat suatu laba.

2. Kewajiban (Liabilitas)

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi

Liabilitas dibagi menjadi dua berdasarkan periode pengembalian atas kewajiban. Dapat dikategorikan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek:

- Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Liabilitas jangka pendek memiliki periode paling lama lima tahun. Jumlah kewajiban yang harus dikembalikan juga tidak terlalu besar dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.
- Liabilitas jangka panjang ialah kewajiban yang memiliki jatuh tempo yang lama. Liabilitas jangka panjang sedikit berbeda dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang ketika jatuh tempo maka sebagian akan menjadi liabilitas jangka pendek.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

4. Pendapatan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Suparmoko dalam Artaman (2015) secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pension.

5. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Dalam posisi keuangan, aktiva/aset memiliki banyak macamnya salah satunya adalah aktiva/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Definisi Aset Tetap

Menurut Kieso (2011:510) definisi aset tetap atau yang disebut property, plant and equipment adalah:

“... aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk

disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:16) pengertian aset tetap adalah: “Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

B. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Samryn (2012:256) agar dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap, suatu aktiva harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

1. “Berwujud ini berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik.
2. Umumnya lebih dari satu tahun, aktiva ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
4. Tidak diperjualbelikan, suatu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih satu tahun tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali, tidak termasuk dikategorikan aktiva tetap dan harus dimasukkan kedalam kelompok persediaan.

5. Material barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan modal aktiva perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan sendiri mengenai materialitas tersebut.
6. Dimiliki perusahaan, aktiva berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi di sewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap.”

C. Pengelompokan Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. “Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

2.1.1.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:7) adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat Diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.1.2 Asimetri Informasi

2.1.2.1 Definisi Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:105) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217):

“Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan. Dalam lingkup perpajakan, asimetri informasi terjadi diantara wajib pajak dan Fiskus, dikarenakan adanya asimetri informasi ini maka tindakan-tindakan untuk agresivitas pajak dapat terjadi.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya.

Menurut Scott (2009:13), dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*
Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.
2. *Moral Hazard*
Moral hazard is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.

Berdasarkan pernyataan di atas *adverse selection* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana salah satu atau beberapa pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial, mempunyai keuntungan informasi dibanding pihak yang lainnya.

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Berbeda dengan *adverse selection*, dalam *moral hazard* ketimpangan informasi benar-benar merugikan pihak lainnya, karena pihak lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak lawan.

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Definisi *Leverage*

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:61), rasio solvabilitas atau *leverage* adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva”.

Menurut Irham Fahmi (2015:72), rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk:

“... mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Menurut Kasmir (2016:151), *leverage* adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar perusahaan lebih bergantung kepada pinjaman luar, daripada membiayai asetnya dengan modal sendiri.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* adalah:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur berapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
8. Dan tujuan lainnya”.

Selain itu manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2012:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri;
8. Dan manfaat lainnya”

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pengukuran Rasio *Leverage*

Jenis-jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya menurut Kasmir (2016:157) yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga.

$$\textit{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Beban Bunga}}$$

5. *Coverage Ratio*

Coverage Ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban.

$$\textit{Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Kewajiban}}$$

2.1.4 *Capital Intensity*

2.1.4.1 *Definisi Capital (Modal)*

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017), *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh.

Menurut Munawir (2007:19), modal adalah: "... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya".

Menurut Lucas Setia Atmaja (2008:155) modal adalah "... dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan operasi perusahaan".

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *capital* (modal) adalah dana yang digunakan perusahaan dalam aktivitas pendanaan atau operasi perusahaan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis *Capital* (Modal)

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.

Jenis-jenis modal menurut Bambang Riyanto (2001: 227 & 240), adalah:

1. Modal Asing
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan "hutang" yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau hutang terbagi atas tiga golongan, yaitu:
 - a. Hutang Jangka Pendek (*Short-term Debt*)
 - b. Hutang Jangka Menengah (*Intermediate-term Debt*)
 - c. Hutang Jangka Panjang (*Long-term Debt*)
2. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan".

2.1.4.3 Definisi *Intensity* (Intensitas)

Menurut Partanto, dkk (1990) dalam Kamus Ilmiah Populer, “intensitas adalah kemampuan atau kekuatan, gigih tidaknya, kehebatan”.

Sedangkan menurut Ashari M. Hafi (1996) dalam Kamus *Psychology*, intensitas adalah kuatnya tingkah laku atau pengalaman, atau sikap yang dipertahankan”.

Adapun definisi intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “... keadaan tingkat atau ukuran intens. Intens di sini merupakan sesuatu yang hebat atau sangat tinggi, bergelora atau penuh semangat dan sangat emosional.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah suatu keadaan atau tolak ukur yang begitu kuat atau sangat besar.

2.1.4.4 Definisi *Capital Intensity*

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aset tetap (dijual) atau peningkatan aset tetap (pembelian).

Menurut Noor et al., (2010:190), intensitas modal didefinisikan sebagai “rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total

aset. Rasio ini menggambarkan seberapa aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap”.

Keterkaitan perpajakan dengan pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap ataupun modal dapat dilihat dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Hanum (2013:4), *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah:

“... aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasinya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan”.

Menurut Winarno (2015:12) intensitas modal merupakan: “...rasio antara penjualan dengan total aset”. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini merupakan hambatan masuk bagi perusahaan baru. Perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, kalau tidak perusahaan tersebut tidak akan mampu memasuki pasar yang baru. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tentunya akan lebih mudah memperoleh laba. Rasio ini mencerminkan kemampuan

perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut.

Menurut Pradnyadari (2015:18), *Capital intensity* atau intensitas modal adalah:

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah rasio antara total aset tetap dengan total aset perusahaan, yang dapat menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

2.1.4.5 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Menurut Siregar dan Widyawati (2016), *capital intensity* diukur dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah (2014), bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang pajak.

Capital intensity menurut Hanum (2013:6) variabel ini diukur dengan menggunakan rasio antara total aset tetap terhadap total aset dihitung sebagai berikut:

$$\textit{Capital Intensity Ratio} = \frac{\textit{Total aset tetap}}{\textit{Total aset}}$$

Menurut Winarno (2015:14) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total Aset. *Total assets turn over* dihitung sebagai berikut:

$$\textit{Total assets turn over} = \frac{\textit{Penjualan}}{\textit{Total aset}}$$

2.1.5 Agresivitas Pajak

2.1.5.1 Definisi Pajak

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus Sambodo (2015:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6): “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut Sukrisno Agoes (2014:7)

antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

2.1.5.5 Definisi Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, akhirnya perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170), bahwa:

“Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*”.

Menurut Jessica dan Toly (2014:5), agresivitas pajak merupakan:

“... bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Apabila dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal, dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan”.

Menurut Lanis dan Richardson (2012:86) bahwa: "... pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*grey area*) maupun kegiatan yang ilegal".

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya, dengan cara menekan beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin.

2.1.5.6 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Sari dan Martani (2010:9), agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

$$ETR_{it} = \frac{\text{total tax expense}_{it}}{\text{pre - tax income}_{it}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR_{it} = \frac{\text{cash tax paid}_{it}}{\text{pre - tax income}_{it}}$$

3. *Book Tax Difference Manzon Plesko* (BTD_MP)

$$BTD_MP_{it} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{\text{Total asset}_{it-1}}$$

4. *Book Tax Difference Desai-Dharmapala* (BTD_DD)

$$BTD_DD_{it} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

5. *Tax Plan*

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum t - 2 [PT * 30\% - \text{Current portion of total tax expense}]:3}{\text{Ending Asset}_{it}}$$

Menurut beberapa ahli agresivitas pajak sebagai berikut:

Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) dalam Silvi Widia (2015:40) menyatakan bahwa:

“... ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.”

Menurut Lanis dan Richardson (2012:91), pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{\text{total tax expense}_{it}}{\text{pre-tax income}_{it}}$$

Keterangan:

ETR_{it}: *Effective Tax Rate* Perusahaan i pada periode ke t

Total *Tax Expense_{it}*: Jumlah beban pajak penghasilan perusahaan i pada periode ke t

Pre-tax income_{it}: Laba sebelum pajak perusahaan i pada periode ke t

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung agresivitas pajak ialah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi (utang), maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010) dalam Sukmawati dan Rebecca (2016).

Hal tersebut menandakan perusahaan tidak agresif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah tidak akan bermasalah dengan tingkat laba yang rendah karena perusahaan tidak sedang terikat dengan kontrak utang pada pihak ketiga. Sehingga tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat agresivitas pajak karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung akan meningkatkan laba mereka (Watts dan Zimmerman, 1986) dalam Adisamartha dan Noviari (2015).

Dengan demikian, semakin rendah tingkat *leverage* berarti penggunaan sumber dana pinjaman (utang) perusahaan akan rendah pula. Perusahaan akan membayarkan beban bunga yang rendah kepada pihak kreditur. Beban bunga tersebut akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga beban pajak yang

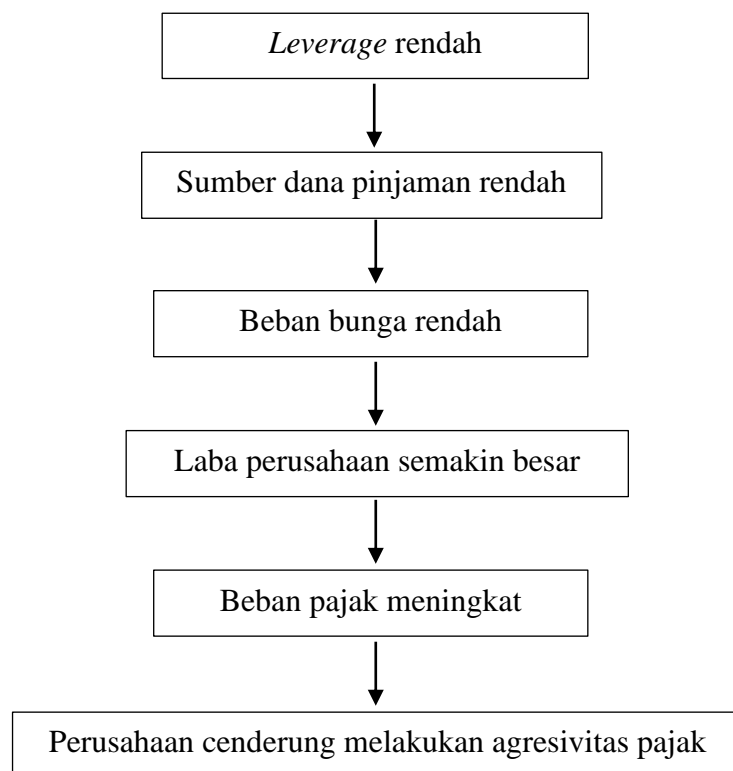
ditanggung perusahaan akan ikut meningkat. Dengan meningkatnya beban pajak tersebut, perusahaan akan berupaya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), Nugraha dan Meiranto (2015), Sukmawati dan Rebecca (2016), serta Purwanto, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak



2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Siregar dan Widyawati (2016), *capital intensity* diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

Capital intensity berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Aset tetap yang besar akan mempunyai beban penyusutan yang juga besar, dan akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajak yang dibayarkan juga akan berkurang (Nugraha dan Meiranto, 2015). Akibatnya perusahaan akan memiliki *effective tax rate* yang tinggi, baik mendekati atau melebihi tarif pajak penghasilan badan yaitu 25%, maka tingkat agresivitas pajak semakin rendah (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

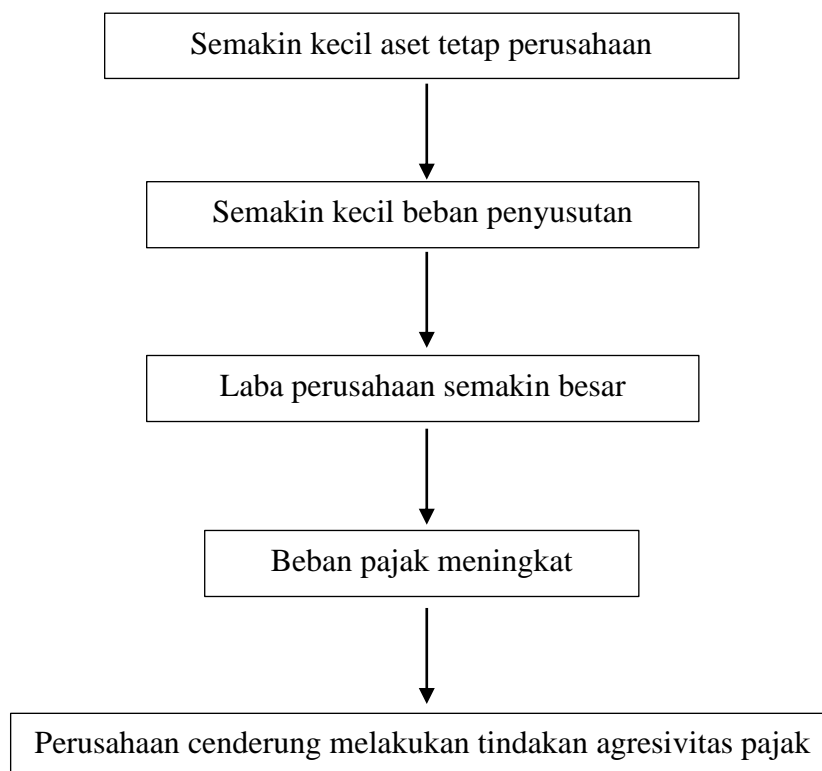
Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan dengan rasio aset tetap dibanding total aset. Semakin kecil aset tetap perusahaan maka beban penyusutan yang ditimbulkan akan semakin kecil, dan itu akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin besar. Laba perusahaan yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi meningkat. Sehingga dengan meningkatnya beban pajak tersebut, perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang dibayarkannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua adalah:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak



2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.